

BEBERAPA MASALAH IDENTIFIKASI DIRI ORANG CINA-INDONESIA DAN YINHUA DALAM KAITANNYA DENGAN ASIMILASI

Hari Poerwanto

I

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mengklasifikasikan seseorang di Indonesia sebagai orang Cina, merupakan sesuatu yang amat sukar (Skinner, 1963: 67; Suryadinata, 1986: 2); dan sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa hal itu bukan sesuatu yang sulit. Willmott (1961: 15) berpendapat bahwa tidak ada sedikit keraguanpun dalam mengklasifikasikan seseorang itu apakah termasuk sebagai orang Cina. Sebelum Perang Dunia II sebagian besar laki-laki Cina di Indonesia telah melakukan perkawinan dengan wanita bumiputera. Anak-anak dari hasil perkawinan campuran tersebut, hampir dapat dipastikan menjadi Cina. Keturunan mereka memiliki nama Cina dan lebih terasimilasi serta terakulturasi ke dalam keluarga Cina.

Hadirnya dua pandangan yang berlawanan itu menunjukkan ada kompleksitas permasalahan yang dihadapkan kepada orang Cina di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah identifikasi diri, terlebih dikaitkan dengan gagasan jika asimilasi dalam rangka integrasi nasional. Lebih lanjut Leo Suryadinata menilai bahwa masalah mengklasifikasikan apakah seseorang itu termasuk orang Cina atau bukan adalah lebih terkait pada identifikasi diri dan identifikasi sosial daripada didasarkan status kewarganegaraan, latar belakang budaya maupun ras.

Banyak di antara orang Cina-Indonesia adalah berasal dari keturunan orang tua atau generasi di atas yang telah melakukan 'perkawinan campuran'. Diantara keturunan mereka itu, sebagian besar tidak dapat lagi menulis dan membaca aksara Cina serta tidak dapat berbahasa Cina (Weldon, 1974; Poerwanto 1973, 1990; Wilmott, 1960). Oleh karena itu salah satu indikator penting dalam mengklasifikasikan apakah ia termasuk *Peranakan* ataukah *Totok* adalah bahasa yang dipergunakan sehari-harinya. Orang Cina *Peranakan* adalah mereka yang sehari-harinya lebih mempergunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Cina (Suryadinata dan Coppel, 1983: 10).¹

¹Yang dimaksud dengan Bahasa Cina adalah termasuk bahasa kesatuan di RRC (*Hwa-yu* atau yang sering dikenal dengan bahasa Mandarin) dan berbagai bahasa daerah dari setiap suku-bangsa, misalnya bahasa Hokkian, Khek (Gek), Teochiu, Kanton dan sebagainya. Selanjutnya, lihat pula penelitian Peter D. Weldon (1974) yang berkaitan dengan masalah pemakaian bahasa sehari-hari dikalangan orang Cina di empat kota besar, ialah Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya; terutama untuk mengukur derajad asimilasi mereka. Demikian pula lihat tulisan Hari Poerwanto (1973 dan 1990) mengenai hal yang sama dikalangan orang Cina di Blora dan Singkawang.

Jika identifikasi diri tersebut diterapkan untuk semua orang Cina di Indonesia maka apa yang dikatakan Leo Suryadinata dan Charles Coppel, tidak seluruhnya benar seperti apa yang dikatakan oleh Jackson (1970: 44—45). Di Kalimantan Barat, istilah *Peranakan* hanya dipakai untuk membedakan keturunan dari orang tua atau generasi di atasnya yang pernah melakukan perkawinan campuran dengan bumiputera. Akan tetapi dalam hal penghayatan terhadap kebudayaan lokal, misalnya bahasa; Jackson menilai bahwa orang Cina di Jawa jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di Kalimantan Barat. Sekalipun orang Cina di Kalimantan Barat adalah keturunan dari orang tua atau generasi di atas mereka yang pernah melakukan perkawinan campuran, sehari-harinya lebih mempergunakan bahasa Cina (bahasa Khek) daripada bahasa daerah (Melayu atau Dayak) dan bahasa Indonesia.

II

Dalam suatu kehidupan masyarakat mejemuk seperti di Indonesia, masalah identifikasi diri orang Cina seperti apa yang diungkapkan oleh Mely G. Tan (1979: vii, 1976: 25) dan Leo Suryadinata (1986: 191—193), menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Dikatakan bahwa di Indonesia terdapat dua penilaian yang ambivalen terhadap orang Cina². Timbulnya sikap seperti itu adalah erat kaitannya dengan komposisi penduduk majemuk yang mengenal hubungan mayoritas-minoritas. Oleh karena itu pula masalah yang berkaitan dengan kehadiran keturunan orang Cina di Indonesia adalah erat kaitannya dengan proses pembangunan watak bangsa. Sementara itu, Leo Suryadinata mengatakan bahwa sekalipun telah meninggalkan identitasnya sebagai orang Cina dan mengidentifikasi dirinya sebagai golongan *Peranakan*, mereka tetap dianggap sebagai orang Cina. Mereka belum dapat diterima sepenuhnya sebagai bagian dari nasion Indonesia karena sebagai pendatang, 'ke-Indonesia-an' orang Cina masih perlu dipertimbangkan.

Timbulnya sikap dan penilaian suku-bangsa bumiputera yang ambigu terhadap orang Cina, kiranya tidak terlepas dari sikap mendua yang tercermin dalam sistem nilai dan perilaku orang Cina-Indonesia. Kuatnya orientasi dan identifikasi diri orang Cina terhadap kebudayaan leluhur, sering dinilai sebagai kendala yang menyebabkan kurangnya *sense of belonging* dan loyalitas terhadap 'negara baru' mereka. Sekalipun telah memiliki status warganegara Indonesia, ternyata mereka lebih loyal kepada

²Lebih lanjut Mely G. Tan mengatakan "Tidak ada yang bersikap acuh tak acuh, malah biasanya sikap itu bersifat ekstrem; membenci atau sebaliknya menyayangi mereka. Sikap ekstrem inipun tidak konstan pada orang atau kelompok-kelompok tertentu; dalam keadaan tertentu bisa disenangi, dalam keadaan lain dibenci".

negeri leluhur dan cenderung mengorganisasikan dirinya dalam ikatan organisasi sosial yang berbau kebudayaan Cina (Mitchison, 1961: 29 — 35).³ Penilaian serupa juga dilontarkan oleh Robert van Neil (1984: 15) dan Somers Heidhues (1974: 54). Sekalipun telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia, mereka tetap masih berorientasi kepada negeri leluhur. Oleh karena itu timbul pertanyaan, dapatkah orang Cina dan anak cucu-mereka itu berasimilasi dan menghilangkan ke Cinaannya sementara dikalangan mereka tetap terdapat perbagai organisasi kepercayaan, kebudayaan dan pendidikan yang terpisah dengan bumiputera (Heidhues, 1974: 58).⁴

Guna memahami analisis hubungan antara status kewarganegaraan (Indonesia) yang dimiliki dan loyalitas mereka terhadap negara, G.P. Jan (1960: 12 — 14) mengusulkan agar mengkaitkannya dengan ajaran Kong Fu Tse yang termaktub dalam *The Four Books*.⁵ Pada hakekatnya, kedua ajaran tersebut amat menekankan rasa hormat dan kasih sayang terhadap orang tua, karena itu menurut penilaian Jan, ajaran tersebut kurang mendukung emigrasi orang-orang Cina. Dalam banyak hal terbukti bahwa apabila mereka terpaksa melakukan emigrasi, maka konsep *chia-tsu* yang tercermin dalam kuatnya ikatan kekeluargaan, amat ditekankan dan merupakan ciri khas kolonisasi orang Cina di daerah perantauan.

³Lebih lanjut ia mempertanyakan "Adakah imigran Cina, anak atau keturunannya dapat merupakan warganegara yang baik dari suatu negeri di mana ia dilahirkan?. Dapatkah orang Cina di Indonesia menjadi orang Indonesia dalam arti yang sebenarnya, terutama karena secara fisik adalah berbeda; demikian pula adat istiadat dan sistem kemasyarakatannya".

⁴Lontaran pertanyaan Somers Heidhues di dasarkan atas fakta yang menunjukkan bahwa perbagai struktur organisasi kemasyarakatan orang Cina di *Nanyang* yang bersifat khas. Organisasi satu dengan lainnya saling memiliki ikatan, baik formal maupun sebaliknya. Biasanya, organisasi tersebut dinilai sebagai pusat kekuatan dan berfungsi untuk mengidentifikasi seseorang. Secara formal, masing-masing organisasi tersebut (seolah-olah) berdiri sendiri tetapi sebenarnya adalah terintegrasi ke dalam suatu sistem yang dikenal luas di Indonesia dengan nama *Kong-Koan*. Neil berpendapat bahwa kuatnya orientasi terhadap kebudayaan leluhur, tidak terlepas dari rasa bangga atas kejayaan negeri Cina di masa lampau, antara lain tercermin dalam pandangan bahwa negaranya adalah pusat dunia. Bangsa-bangsa di luar negeri Cina termasuk kebudayaan mereka dinilainya barbar dan berkebudayaan rendah.

⁵Dua ajaran Kong Fu Tse yang dianggapnya dapat dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis adalah yang antara lain mengatakan; (a) "*While his parents are alive, the son may not be abroad to a distance. If he does go abroad, he must have a fixed place to which he goes*" dan (b) "*While a man's father is alive, look at the bent of his will, while his father is dead look at his conduct. If for three years he does not alter from the way of his father, he may be called filial*". Status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang, diibaratkan sebagai hubungan antara anak dengan orang tua, atau antara rakyat dengan raja. Oleh karena itu, kehilangan status kewarganegaraan semula (RRC) adalah berarti terputusnya hubungan antara anak dengan orang tuanya. Apabila seorang anak kehilangan orang tuanya atau sebaliknya, ia akan kehilangan rasa hormat. Dengan kata lain ia akan menjadi anak durhaka terhadap orang tuanya yang berakibat orang tua kehilangan anak atau raja kehilangan rakyat. Jika hal ini terjadi, anak atau rakyat tidak dapat memenangkan *min hsin* dari orang tua atau raja.

Kuatnya pengaruh ajaran Kong Fu Tse terhadap pembentukan sikap dan perilaku mereka, telah menyebabkan identitas diri mereka terbagi dan dalam perwujudannya ke luar tampak pada sikap yang ambivalen. Menurut penilaian Everett V. Stonequist bahwa sikap mendua adalah sesuatu hal lazim di kalangan kelompok *marginal*, yaitu sebagai akibat proses kehidupan dalam dua kebudayaan atau dua sistem hubungan sosial.⁶

Mengingat hal di atas maka tepat kiranya rumusan yang dibuat oleh Sanggar Kerja Tentang Masalah Warganegara Asing Cina dan Orang-orang Tanpa Negara pada 1967 bahwa pokok permasalahan utama dalam rangka asimilasi orang Cina yang telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia adalah erat kaitannya dengan menumbuhkan *sense of belonging* dan loyalitas terhadap negara. Selanjutnya, kurangnya *sense of belonging* dan loyalitas, seringkali juga dihubungkan dengan kuatnya orientasi dan identifikasi diri terhadap kebudayaan negeri leluhur. Oleh karena itu faktor apakah yang menyebabkan sikap ambivalen orang Cina, Victor Purcell, Somers Heidhues, Wang Gungwu dan Charles Coppel mencoba melihatnya lebih lanjut.

III

Wang Gungwu (1981: 264-265), menekankan bahwa untuk memahaminya loyalitas dan identitas diri orang Cina perantauan, kiranya perlu mengkaitkannya dengan (1) kompleksitas permasalahan mereka dan (2) peristiwa tertentu yang melingkarinya. Dalam hal ini, tidak ada suatu pembagian tunggal yang lebih penting dan dapat berlaku umum. Pada suatu level abstraksi tertentu memang dapat dilakukan generalisasi, misalnya yang menyangkut sikap mereka terhadap RRC maupun Taiwan serta sikap mereka terhadap bumiputera di mana ia bertempat tinggal. Sementara yang lain dapat pula dikaitkan dengan keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas Cina tertentu. Berdasarkan kerangka pandangan tersebut maka Wang Gungwu mengklasifikasikan orang Cina di Asia Tenggara berdasarkan; (pertama) dalam konteks hubungan mayoritas-minoritas, dan (kedua) derajat radikalisme politik.

⁶Selanjutnya, menurut C. Kerkhoff yang dikutip oleh H.F. Dickie (1969) mengatakan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok *marginal*, biasanya tidak mengidentifikasi dirinya kepada suatu *reference group* tertentu. Biasanya mereka selalu dibayangkan rasa tak aman, terlampaui menaruh rasa kasihan kepada dirinya sendiri (*self pity*) dan amat peka perasaannya. Kesemuanya itu lebih disebabkan oleh suatu situasi dan keadaan yang dihadapinya. Mereka dihadapkan pada situasi masyarakat yang berbeda dengan latar belakang kebudayaan yang dimilikinya. Masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda yang daerahnya ia tempati menghendaki agar mereka ia berorientasi kepadanya; sedangkan ia sendiri sebenarnya tidak menginginkan orientasi ke sana. Sebagai akibatnya, mereka akan selalu berada pada keraguan, yaitu antara ya dan tidak dengan berbagai pertimbangan yang mungkin akan dapat timbul sebagai akibat sikap dan perilakunya.

Berdasarkan hubungan mayoritas-minoritas, orang Cina perantauan dapat dibagi ke dalam empat kelompok. Pertama, ialah kelompok A yang memiliki orientasi kuat terhadap RRC, baik karena status kewarganegaraan yang dimilikinya maupun karena aktivitas mereka sangat ditentukan oleh status tersebut. Mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini dapat digolongkan sebagai orang Cina yang chauvinistik. Selain memiliki status kewarganegaraan RRC, ada kemungkinan mereka juga mempunyai status warganegara Taiwan; dan bahkan tidak segan-segan ada pula yang memiliki status kewarganegaraan suatu negara di mana ia sekarang bertempat tinggal. Jumlah orang Cina yang termasuk dalam kelompok ini adalah cukup besar. Kedua, merupakan orang-orang Cina yang diklasifikasikan kelompok B. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang menerima dan melihat arti penting dari loyalitas terhadap negara di mana ia bertempat tinggal. Akan tetapi demi kepentingan ekonomi, dipandang perlu berlandung pada identitas dirinya sebagai orang Cina yang diwujudkan dalam bentuk menjadi anggota salah satu ikatan keluarga (*Tse*) atau organisasi kemasyarakatan yang berbau Cina. Ketiga adalah kelompok C. Secara politik, yang termasuk dalam kelompok ini cenderung mengidentifikasi dirinya kepada negara di mana ia sekarang bertempat tinggal. Oleh karena itu mereka cenderung ke arah bumiputera dan telah mempersiapkan dirinya untuk hidup dan mati di negara yang telah dianggapnya sebagai negeri sendiri. Sekalipun demikian, sebenarnya kelompok inipun juga terbagi ke dalam beberapa sub kelompok. Banyak diantara mereka ini mendapatkan pendidikan lokal di negara di mana ia bertempat tinggal atau pernah mendapatkan pendidikan pada sekolah 'model kolonial'. Kiranya juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang Cina yang pernah mendapatkan pendidikan lokal dapat dikategorikan kelompok C. Keempat, ialah kelompok D yang terdiri dari orang-orang Cina yang secara menyeluruh telah terasimilasi ke dalam bumiputera. Mengingat asimilasi mereka ke dalam kebudayaan bumiputera demikian mendalam maka dari waktu ke waktu hanya pernah dikenal berasal dari mereka itu berdarah Cina.

Setelah Perang Dunia I, ada kecenderungan timbul perasaan kurang puas di kalangan orang Cina yang tinggal di perantauan, terutama dari kalangan terpelajar. Hal ini sejalan dengan kebangkitan Nasionalisme di bawah Sun Yat Sen di negeri Cina dan perlakuan pemerintah jajahan di mana mereka bertempat tinggal. Setelah Perang Dunia ke II selesai, negeri Cina terbagi dua (RRC yang Komunis dan Taiwan yang Nasionalis) dan daerah rantau di mana mereka bertempat tinggal, satu demi satu menjadi negara merdeka. Keadaan dan perlakuan dari negara-negara yang ditempatinya yang dinilai merugikannya, merupakan alasan utama mereka untuk melibatkan diri dalam gerakan politik radikal.

Dalam konteks derajat radikalisme politik, Wang Gungwu mengklasifikasikan orang Cina ke dalam tiga kelompok. Kelompok A

adalah yang memiliki derajat radikalisme politik yang tinggi dan bahkan cenderung radikalisme mereka bersifat ekstrim, terutama yang berkaitan dengan identifikasi politik terhadap salah satu negara Cina, RRC atau Taiwan. Jika diamati lebih lanjut, ada kalanya radikalisme politik mereka itu memiliki latar belakang dan tujuan yang saling berbeda. Sebaliknya mereka yang diklasifikasikan ke dalam kelompok C, sekalipun memiliki sikap radikal tetapi cenderung lebih dipengaruhi oleh suatu idealisme yang terkait langsung dengan kondisi sosial yang diinginkannya. Dengan kata lain, Wang Gungwu melihat bahwa radikalisme mereka itu lebih didorong oleh keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya itu loyal terhadap negeri di mana ia tinggal daripada didorong oleh alasan karena ia adalah keturunan Cina. Sebagai keturunan orang Cina yang telah memiliki status kewarganegaraan suatu negara di mana ia bertempat tinggal, perbagai masalah yang diadopsinya ingin dicarikan penyelesaiannya secara radikal.

Jumlah mereka yang termasuk ke dalam klasifikasi kelompok A dan C, sangat kecil. Menurut penilaian Wang Gungwu, sebagian besar orang Cina di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah termasuk klasifikasi kelompok B. Loyalitas dari orang-orang Cina dalam kelompok ini lebih tertuju pada komunitas Cina yang telah menjaganya. Siapakah komunitas Cina yang melindunginya, apakah termasuk kelompok radikal atau bukan; umumnya mereka tidak peduli asalkan dapat menjaga dan melindungi kepentingannya. Oleh karena itu tepat kiranya ungkapan penilaian Victor Purcell (1964: 462) bahwa untuk memahami loyalitas orang Cina perantaraan terhadap negara di mana mereka sekarang bertempat tinggal, dapat dikaitkan dengan makna arti yang terkandung dalam ibarat 'untuk apa memiliki sapi kalau tidak dapat diperah susunya'.

Usaha mengklasifikasikan loyalitas orang Cina di Indonesia, juga dilakukan oleh Somer (1974: 75) dan Coppel (1983), di samping menunjukkan persamaan, kedua dasar pengklasifikasian mereka juga memperlihatkan perbedaan dasar pandangan. Menurut Somers, untuk memahami loyalitas orang Cina di Indonesia, hendaknya dikaitkan pula dengan peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan RI, yaitu yang terjadi di masa penjajahan Hindia-Belanda. Pada awal abad XX, masyarakat Cina di Hindia-Belanda terbagi ke dalam tiga orientasi. Pertama kaum Cina Nasionalis yang diwakili oleh kelompok *Sin Po*, kedua yang berkooperasi dengan pemerintah kolonial yang diwakili oleh kelompok *Chung Hua Hui* dan ketiga adalah kelompok yang diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang bekerjasama dengan kaum nasionalis Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, masyarakat Cina di Indonesia terbagi ke dalam tiga kelompok, ialah (1) yang berorientasi kepada RRC dan Taiwan, (2) yang berorientasi kepada Belanda dan (3) yang berorientasi ke Indonesia.⁷

⁷Dijelaskan lebih lanjut bahwa setelah kemerdekaan RI, orang-orang Cina yang pernah mengalami sekolah Cina di masa penjajahan, cenderung berorientasi kepada RRC atau Taiwan. Sebelum terputusnya hubungan RI-RRC pada tahun 1967, anak-anak mereka

Selanjutnya, berdasarkan loyalitas politik, Charles Coppel (1983: 2) mengklasifikasikan orang Cina Indonesia ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah mereka yang loyal terhadap pemerintah RRC (komunis), kedua adalah mereka yang loyal kepada pemerintah Taiwan (nasionalis) dan ketiga adalah mereka yang tidak loyal terhadap pemerintah suatu negara manapun. Kelompok orang Cina ini tidak peduli apakah menjadi warganegara Indonesia atautkah negara lain asalkan mereka dapat menjalankan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Ini berarti, sebenarnya Coppel juga kurang percaya apakah memang ada orang Cina yang loyal terhadap negara di mana ia sekarang bertempat tinggal sekalipun ia telah memiliki status kewarganegaraan negeri tersebut.⁸

IV

Sebagai akibat polemik mengenai asimilasi dalam majalah *Star Weekly* yang berlangsung sejak 13 Februari sampai dengan 25 Juni 1960, muncul tiga klasifikasi kelompok orang Cina di Indonesia. Pertama adalah kelompok yang tidak percaya kalau masalah kaum Cina *Peranakan* akan dapat diselesaikan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah mereka yang menolak status kewarganegaraan Indonesia pada periode 1950 — 1951.⁹ Mereka lebih suka memilih menjadi warganegara RRC daripada Indonesia. Kedua adalah kelompok yang percaya bahwa masalah kaum *Peranakan* Cina akan dapat diselesaikan secepatnya dan memuaskan. Banyak diantara mereka yang termasuk dalam kelompok ini menyatakan penolakannya

cenderung dikirimkan ke berbagai lembaga pendidikan yang terdapat di RRC maupun Taiwan. Sebaliknya mereka yang tetap berorientasi kepada Belanda, adalah mereka yang pernah mendapatkan pendidikan sekolah Belanda, baik yang berada di Hindia Belanda maupun di negeri Belanda. Yang termasuk dalam klasifikasi ini, setelah kemerdekaan cenderung mengirimkan anak-anak mereka guna melanjutkan pendidikan di negara-negara Ero-Amerika dan setelah menyelesaikan pendidikannya cenderung tetap berada di luar negeri, sementara itu ia tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesiannya. Akhirnya, orang-orang Cina yang berorientasi kepada Indonesia, sejak masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan, biasanya tidak pernah mempersoalkan lembaga pendidikan milik siapakah yang dimasukinya. Selama revolusi kemerdekaan, mereka aktif membantu perjuangan dan sebagian dari mereka setelah kemerdekaan ada yang bekerja sebagai pegawai negeri. Banyak diantara mereka yang termasuk ke dalam kategori ini, telah menyatakan sebagai warganegara Indonesia sejak 1946.

⁸Pada tahun 1957, Skinner (1973) pernah melakukan penelitian orang Cina *Totok* di Indonesia, dan diperoleh gambaran 43% pro RRC, 28% agak pro pemerintah RRC, 18% pro Taiwan, 5% agak pro pemerintah Taiwan dan ada 6% bersifat netral dalam pengertian tidak berpihak pada suatu negara manapun.

⁹Persetujuan perihal pembagian kewarganegaraan merupakan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag Negeri Belanda pada 2 Nopember 1949. Realisasi persetujuan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1950 ialah mengenai Menyatakan Hak Memilih dan Hak Menolak Kebangsaan Indobesia Bagi Orang Yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda; dan selanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman tentang Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pembagian Warganegara (PPPPW) tertanggal Jakarta 2 Februari 1950.

menjadi warganegara RRC dan memilih kewarganegaraan Indonesia. Banyak diantara mereka yang termasuk kategori kedua ini, telah menjadi warganegara Indonesia sejak 1946 tatkala untuk pertama kalinya Undang-undang Nomer 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ketiga adalah kelompok orang Cina seperti yang terdapat pada kategori kedua tetapi pandangan mereka atas pemecahan masalah kaum *Peranakan* tidak mungkin diselesaikan secara cepat dan akan memakan waktu yang cukup lama. Mereka menyadari bahwa pemecahan atas permasalahan ini terkait dengan berbagai hal.

Jika dianalisis lebih lanjut, terutama berdasarkan atas perkembangan yang terjadi sampai dengan tahun 1980-an, klasifikasi yang dibuat oleh majalah *Star Weekly*, tidak seluruhnya benar. Identifikasi mereka terhadap negara 'baru'nya, bukan hanya semata-mata didorong oleh pandangan mereka terhadap bagaimanakah penyelesaian yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia terhadap masalah-masalah mereka; melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya semata-mata menyangkut kepentingan dan kelangsungan usaha mereka saja melainkan pula harus dikaitkan dengan kompleksitas yang ada di kalangan masyarakat Cina itu sendiri dan keanekaragaman suku-bangsa di Indonesia. Oleh karena itu perlu kajian yang lebih komprehensif dan *integrated* yang berkaitan dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada periode setelah kemerdekaan RI 1945 sampai dengan penyerahan kedaulatan negara RIS pada 1949 serta berbagai peristiwa yang menyusul setelah itu sampai dengan dihasilkannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan tahun yang ditandatangani di Jakarta pada 22 April 1955 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah terputuskannya perjanjian itu pada 1967 (Poerwanto, 1990).

Sekalipun demikian, kesimpulan menarik yang muncul dari klasifikasi majalah *Star Weekly* adalah terdapatnya kelompok orang Cina-Indonesia yang menyadari bahwa pemecahan atas masalah yang menyangkut kehadiran mereka sebagai nasion Indonesia; akan memakan waktu yang cukup lama.¹⁰ Kompleksitas permasalahan yang melingkarinya,

¹⁰Leo Suryadinata (1984: 218—219) menilai bahwa saran penyelesaian masalah Cina di Indonesia masih bersifat terlampau umum dan sering menitik beratkan pada aspek ekonomik; padahal seharusnya disadari bahwa faktor ekonomik dan sosial-budaya saling terkait. Guna memecahkan masalah ini, hanya ada empat macam jenis saran; ialah (a) perlunya pembentukan kelas wirausahawan bumiputera, (b) perlunya asimilasi dikalangan orang Cina, (c) perlunya penataan sistem ekonomi Indonesia yang dikaitkan dengan sistem politik, dan (d) yang memandang agar masalah Cina dibiarkan saja berjalan seperti apa adanya (*status quo*). Dari keempat usulan pemecahan masalah Cina, Leo cenderung menilai bahwa sebagian besar yang memandang agar dalam menyelesaikannya berjalan seperti apa adanya. Dengan kata lain Leo memandang bahwa selama ini tidak pernah diusahakan penyelesaian yang serius dari pembuatan kebijaksanaan. Sebagai akibatnya, kelompok orang Cina yang meyakini bahwa selama ini cenderung bersikap pasif, ingin tetap mempertahankan identitasnya sebagai *Peranakan* dan semakin eksklusif terhadap *in-group*.

merupakan kendala penyelesaian secepatnya. Salah satu masalah identifikasi diri yang dikaitkan dengan *sense of belonging* dikalangan mereka yang telah berstatus warganegara Indonesia adalah adanya penilaian bahwa berubahnya sebutan Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina dinilai 'merendahkan'.

V

Sebenarnya, ada cukup banyak istilah yang dipakai untuk menyebut orang Cina yang bertempat di Asia Tenggara, termasuk pula yang tinggal berada di Indonesia. Di masa lalu, sebutan yang dikenal bagi perantauan orang Cina adalah orang Cina *Nanyang*.¹¹ Pada akhir tahun enam puluhan, yaitu tatkala banyak orang Cina di Indonesia pulang ke negeri leluhur sebagai akibat PP 10 Tahun 1959, dikenal pula istilah *Huakiauw* atau *Hua Qiao* yang sering diterjemahkan dengan orang Cina perantauan (*Overseas Chinese*).

Setelah berlangsungnya Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955, adalah suatu kenyataan bahwa di Asia Tenggara termasuk Indonesia terdapat orang-orang keturunan Cina yang memiliki status kewarganegaraan negeri setempat. Setelah ditandatangani Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara pemerintah RI-RRC, berarti status kewarganegaraan Indonesia dikalangan keturunan Cina adalah sah menurut undang-undang kewarganegaraan RI maupun RRC. Mengingat hal tersebut maka Wang Gungwu (1981: 251) pernah mengusulkan dipergunakan istilah *Yinhua* bagi orang Cina yang telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia; atau *Mahua* bagi yang memiliki status warganegara Malaysia dan *Feihua* yang memiliki status kewarganegaraan Philipina. Istilah *Yinhua* adalah kepanjangan dari kata *Yindunixinya* (istilah formal dalam *Hayupinyin* bahasa *Hua Yu* atau Mandarin untuk menyebut Indonesia) dan *Hua* (atau *Hua ren*, istilah formal untuk menyebut semua orang Cina di RRC dalam *Hayupinyin*).

Dalam salah satu artikel Lie Tek Tjeng (1971: 11), ia mengusulkan agar bagi orang Cina di Indonesia dibedakan antara mereka yang disebut dengan *Hua-i* (keturunan orang Cina yang tidak mempunyai konotasi

¹¹Biasanya, istilah *Nanyang* atau *Nan Yang* yang berarti Lautan Selatan dipakai untuk menyebut kawasan atau negara yang terletak di Semenanjung Indo China (Vietnam, Laos dan Kamboja), Semenanjung Melayu dan Indonesia. Secara geografis, perbagai kawasan atau negara tersebut terletak di sebelah selatan dari RRC. Akan tetapi pada masa pemerintahan Dinasti Qing (1644—1911 M), istilah *Nanyang* juga dipergunakan bagi orang-orang Cina yang bertempat tinggal di daerah kawasan pantai Propinsi Jiangsu, Zhejiang, Fujien dan Guangdong. Mereka yang pergi merantau disebut dengan *Huaqiao* yang artinya orang Cina perantauan. Penjelasan lebih rinci mengenai perbagai hal yang berkaitan dengan istilah *Nanyang*, dapat dilihat dalam tulisan Chang Tsen-Kung (1954).

kewarganegaraan RRC) dan *Hoakiu* (bagi mereka yang mempunyai konotasi warganegara RRC maupun Taiwan). Dalam *The Chinese-English Dictionary* (1979: 288), arti yang diberikan pada kata *Huayi* adalah *foreign citizen of Chinese origins* sedangkan *Huaqiao* adalah *overseas Chinese*. Secara lebih terinci, Wang Gungwu membahas perbagai implikasi yang dapat ditimbulkan dari pemakaian istilah *Huaqiao* yang sering hanya diterjemahkan *overseas Chinese*, antara lain dikatakan bahwa istilah tersebut mengandung pengertian luas; bukan hanya sekedar menunjuk tempat tinggal mereka semata melainkan memiliki konotasi arti yang berkaitan dengan solidaritas yang ada dikalangan mereka. Dalam kaitan itu dijelaskan bagaimana pula pemerintah Taiwan dalam melihat konsep istilah tersebut. Diutarakannya bahwa pemerintah Taiwan pertama-tama akan melihat bahwa semua keturunan Cina adalah tetap orang Cina, karena itu ia adalah juga *Huaqiao*; dan baru setelah itu dilihat status kewarganegaraan yang dimilikinya.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, agaknya memang eksistensi 'ke-cina-an' seseorang, bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Setiap ada usaha mengganti suatu istilah yang lazim dipakai untuk menyebutkan identitas diri mereka, akan mengundang polemik seperti yang terjadi tatkala digantikannya istilah *Tionghoa* menjadi *Cina* dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi Republik Rakyat Cina (RRC). Peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 yang berakibat terputusnya hubungan diplomatik RI-RRC, juga diikuti oleh penggantian istilah *Tionghoa* dan *Tionghoa* menjadi *Cina*. Penggantian istilah tersebut dinilai oleh Lie Tek Tjeng (1971: 10—19) dan Leo Suryadinata (1978: 113) bernada menghina dan merendahkan; baik dikalangan pemerintah RRC maupun warganegara Indonesia keturunan Cina. Menurut Lie, istilah *Cina* diambil dari nama Dinasti Ch'in atau Qin yang untuk pertama kalinya berhasil mendirikan negara kesatuan dengan mempersatukan berbagai negara kecil di sana pada 200 M. Di mata orang Han, Dinasti Qin adalah dinasti orang Manchu yang dianggap sebagai penjajah.

Jika disimak lebih lanjut, ada pula diantara warganegara Indonesia keturunan Cina yang melihat bahwa pemakaian istilah tadi tidak mengandung konotasi seperti yang diutarakan Lie dan Leo. Ong Hok Ham dalam kata pengantar dari buku yang ditulis oleh Leo Suryadinata (1984), demikian pula Puspa Vasanty (1970), tetap memakai istilah *Cina*. Demikian pula masyarakat Cina di Kalimantan Barat, khususnya Singkawang, tetap mengidentifikasikan dirinya sebagai orang *Cin* atau dengan istilah lain *Tong nyin* atau orang dari Dinasti Qin atau orang dari Dinasti Tang yang tidak lain juga dinasti orang Manchu yang berkuasa di negeri Cina pada 618 — 907 M. Selain itu, dalam bahasa Inggris, istilah yang lazim adalah *Chinese*, sedangkan negara mereka dikenal dengan *The People Republic of China (RRC)* dan *Republic of China* (Taiwan).

Untuk lebih memahami persoalan di atas, kiranya perlu disimak per-

bagai latar belakang yang melingkarinya. Leo Suryadinata misalnya mengatakan bahwa sampai dengan akhir abad XIX, istilah standard di Hindia Belanda untuk menyebut mereka adalah dengan kata Cina. Menurut Leo, istilah Cina adalah dari bahasa Melayu sedangkan Lie Tek Tjeng melihatnya bahwa istilah tersebut merupakan verbastering (perubahan kata dari susunan standardnya) dari istilah kata Ch'in, yaitu nama dinasti orang Manchu. Pemakaian istilah Tionghoa di Hindia Belanda baru dimulai pada awal abad XX, yaitu tatkala di Batavia didirikan organisasi *Tiong Hoa Hwe Koan* atau THHK (Suryadinata, 1978: 114). Menurutnya, istilah *Chung-hua* adalah sinonim *Chung Kuo* dan erat kaitannya dengan kebangkitan nasionalisme Cina yang muncul pada akhir abad XVIII. Dalam lafal bahasa Indonesia, istilah *Chung-hua* berubah menjadi Tionghoa; sedangkan *Chung Kuo* berubah menjadi Tiongkok yang dalam bahasa *Hua-yu* maupun Hokkian berarti *middle kingdom*.

Dalam perkembangannya, tatkala itu perubahan pemakaian istilah Cina menjadi Tionghoa dan Tiongkok, tidak segera dapat diserap, baik oleh orang Melayu maupun oleh orang-orang Cina di Hindia Belanda. Dalam laporan yang dibuat oleh THHK pada 1902, masih sering dipergunakan istilah 'bangsa Cina', 'sekolah Cina', 'surat Cina' dan sebagainya. Istilah Tionghoa menjadi populer dikalangan orang Cina *Peranakan* seiring dengan bangkitnya semangat nasionalisme Cina mereka. Oleh karena itu, pemakaian istilah *Chung-hua* merupakan manifestasi kongkrit dari solidaritas mereka terhadap nasionalisme yang mengumandangkan agar orang-orang Cina di perantauan lebih berorientasi kepada negeri Cina.

Seperti halnya dikalangan orang Cina *Peranakan*, penggantian istilah Tionghoa dan Tiongkok di kalangan orang Belanda juga berjalan lambat. Secara formal, kedua istilah tersebut baru dipergunakan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1928. Dipergunakannya kedua istilah tersebut adalah berkat usaha yang dilakukan orang-orang Cina, terutama dalam kaitannya agar status mereka disamakan dengan golongan Eropa.

VI

Masa kolonialisme di Indonesia telah berlalu dan dalam perjalanan sejarah terbukti bahwa sebagian besar keturunan orang Cina lebih memilih tetap tinggal di Indonesia dan lebih memilih menjadi warganegara di negeri ini daripada menjadi warganegara RRC maupun Taiwan. Baik fisik maupun kebudayaan, sebenarnya adalah berbeda dengan mereka yang sekarang bertempat tinggal di RRC maupun dengan sesama keturunan perantau orang Cina yang bertempat tinggal di berbagai negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, mereka ini sebenarnya bukan orang *Chung-hua* (*Zhong-hua*) atau Tionghoa yang secara politis berstatuskan warganegara *Chung Kuo* atau Tiongkok, melainkan keturunan orang *Zhong-hua* yang

berstatuskan warganegara Indonesia. Mereka yang telah berstatuskan warga negara Indonesia adalah kurang tepat jika harus diidentifikasi dan mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok *Peranakan*, yaitu sebagai lawan *Totok* karena berstatuskan warganegara asing. Sebenarnya, usaha untuk menarik garis pemisah antara *Peranakan* dan *Totok* adalah kurang tepat jika hanya dikaitkan dengan status kewarganegaraan mereka tanpa melihat latar belakang kebudayaan yang dimilikinya. Ong Hok Ham (1983: 52) bahkan berpendapat bahwa pada dasarnya orang Cina di Indonesia, mewarisi unsur *Peranakan* maupun *Totok*. Dengan kata lain, mereka itu termasuk keturunan Cina adalah secara budaya berpola lokal dan Cina. Oleh karena itu, perbedaan antara *Peranakan* dan *Totok* adalah lebih merupakan perbedaan kelas dalam suatu masyarakat imigran.¹²

Mengingat berbagai hal tersebut di atas, kiranya usulan Wang Gungwu merupakan alternatif istilah yang tepat untuk menggantikan *Cina* yang dirasa bernada merendahkan oleh sementara orang Cina-Indonesia. Jelas dalam hal ini, baik istilah (keturunan) orang Tionghoa adalah tidak tepat jika tetap dipakai karena mereka itu secara formal telah berstatuskan warganegara Indonesia dan bukan warganegara RRC atau Taiwan (*stetless*). Kiranya, istilah *Yinhua* dapat pula menjembatani keanekaragaman suku-bangsa perantauan Cina di Indonesia. Istilah Cina bukan nama atau istilah yang tepat untuk menyebut suatu suku-bangsa tertentu melainkan lebih berkonotasi sebagai sebuah nasion. Dalam kenyataan yang ada, orang Cina di Indonesia terdiri dari berbagai suku-bangsa yang berbeda, antara lain orang Khek (Gek), Hokkian, Teochiu, Kanton, Hainan dan sebagainya. Oleh karena itu berbagai suku-bangsa yang berasal dari negeri Cina, karena status kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya maka cukup layak jika disebut dengan orang *Yinhua* atau orang 'Cina-Indonesia', yang berbeda dengan *Hua ren*, dan berbeda pula dengan *Mahua*, *Feihua* dan sebagainya. Identifikasi diri orang *Yinhua* adalah Indonesia dengan tidak menutup kemungkinan bahwa budaya mereka berpola Cina dan lokal.

Daftar Pustaka

Chang Tsen-Kung, *Historical Geography of Chinese Settlement in the Malay Archipelago*, Dissertasi Ph.D Universitas Nebraska, University Microfilms, 1954.

¹²Lebih lanjut dikatakan bahwa pada dewasa ini tidak satupun keluarga Cina di Jawa yang dapat menelusuri asal-usul keluarganya lebih awal dari abad XVIII. Sementara itu, akhir abad XVIII merupakan periode penting dalam perkembangan orang Cina di Jawa. Mulai saat ini, orang-orang Cina di Jawa cenderung melakukan perkawinan dengan sesama orang Cina. Andaikata diantara mereka ada yang mampu menelusuri asal-usul keluarganya, hanya sedikit saja yang dapat melakukannya dan biasanya hanya mampu sampai dengan batas pertengahan abad ke XIX.

- Copel, Charles, A., *Indonesian Chinese in Crisis*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1983.
- Dickie, H.F., "A Status Ambiguity: The Marginal Situation", dalam *Special Problems in a Changing World: A Comparative Reader*, Wilter M. Gerson (ed.), New York, Thomas Y. Crowell Company, 1969, Hlm. 13 — 23.
- Heidhues, Somers Mary F., *Southeast Asia's Chinese Minorities*, Australia, Longman, 1974.
- Tan, Mely G., "Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia", *Prisma*, (Th. V/8), Jakarta, LP3ES, 1976, Hlm. 24 — 40.
- Prisma*, (Th. V/8), Jakarta, LP3ES, 1976, Hlm. 24 — 40.
- Jan, George, P., *Nationality and Treatment of Overseas Chinese in Southeast Asia*, Dissertasi Ph.D, Faculty Art and Science University of Michigan, New York, University Microfilm, 1960.
- Lie Tek Tjeng, *Masalah WNI dan Masalah Huakiau di Indonesia Jakarta, LRKN-LIPI*, 1971.
- Mitchison, Lois, *The Overseas Chinese: A Background Book*, London, The Badley Head, 1961.
- Niel, Rovert van, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, Dordrecht-Holland, Foris Publication, 1984.
- Ong Hok Ham, *Rakyat dan Negara*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983.
- Poerwanto, Hari, *Golongan Minoritas Cina di Kecamatan Kota Blora: Suatu Penelitian Mengenai Masalah Akomodasi pada Tahun 1972*, Yogyakarta, Skripsi Sarjana S-1 Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1973.
- Poerwanto, Hari, *Orang Khek di Singkawang: Suatu Kajian Mengenai Masalah Asimilasi Orang Cina dalam Rangka Integrasi Nasional di Indonesia*, Jakarta, Disertasi Doktor pada Universitas Indonesia, 1990.
- Purcell, Victor, *The Chinese in Southeast Asia*, London, Oxford University Press, 1964.
- Tan, Mely, G., Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia, *Prisma* (V/8), Jakarta, LP3ES, 1976, Hlm. 24 — 40.
- Tan, Mely G. (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta, PT Gramedia, 1979.
- Skinner, G. William, "Change and Persistence in Chinese Culture Overseas: A Comparison of Thailand and Java". *Southeast Asia: The Politics of National Integration*, John T. McAlister (ed.), New York, Random House, 1973, Hlm. 399 — 416.

- Stonequist, Everett V., *The Marginal Man: A Study in Personality and Cultural Conflict*, New York, Charles Scribner's Sons, 1937.
- Suryadinata, Leo, *The Chinese Minority in Indonesia: Seven Papers*, Singapore, Chapman Enterprise, 1978.
- Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta, Grafiti Press, 1984.
- Suryadinata, Leo, *Pribumi Indonesians: The Chinese Minority and China*, Singapore, Hernemann Asia, 1986.
- Vasantu, Puspa, "Kebudayaan Orang Tjina di Indonesia". *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Koentjaraningrat (ed.), Jakarta, Jambatan, 1971, Hlm. 351 — 370.
- Wang, Gungwu, *Community and Nation Essays on Southeast Asia and The Chinese*, Singapore, ASAA Southeast Asia Publication Series, 1981.
- Williams, Lea E., *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan Chinese Movement in Indonesia 1900 — 1916*, Glencoe-Illinois, Free Press, 1960.
- Willmott, Donald E., *The Chinese of Semarang; A Changing Minority in Indonesia*, Ithaca-New York, Cornell University Press, 1960.
- Willmott, Donald E., *The National Status of the Chinese in Indonesia 1990 — 1958*, Modern Indonesia Project, Ithaca-New York, Southeast Asia Program Department of Far Eastern Studies, Cornell University, 1961.
- Weldon, Peter, Indonesian and Chinese Status and Language Difference in Urban Java" *Journal of Southeast Asian Studies*, (V/1), Singapore, McGraw-Hill Far Eastern Publisher Ltd., 1974, Hlm. 37 — 54.
- Yayasan Tunas Bangsa, *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*, Jakarta, PT. Gramedia, 1977.